

Bantuan Luar Negeri ADB Dalam COREMAP-CTI Fase III untuk Konservasi Laut Indonesia

**Meta Janviena Panjaitan
Januari Pratama Nurratri Trisnaningtyas**

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: metajanviena@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in natural resources, especially marine ecosystems. Currently, this ecosystem is under threat of being damaged due to various factors that have made ADB as a multilateral financial institution in the Asian region participate in supporting marine conservation to boost Indonesian economy. In fact, the marine ecosystem has a big impact, such as contributing 3.7% of Gross Domestic Product (GDP) and has the potential to contribute 1.3 times that amount. By using a qualitative descriptive research method and using concepts related to International Relations, namely Environmental Conservation and Foreign Aid, author will explain and elaborate that the form of ADB's foreign aid to Indonesia in COREMAP-CTI Phase III are financial assistance and technical assistance. The COREMAP-CTI program which has been carried out in three phases has produced significant results for the development of marine ecosystems. Thus, ADB's foreign aid to Indonesia is considered quite significant in marine conservation in Indonesia.

Keywords: Asian Development Bank (ADB), COREMAP-CTI, Environmental Conservation, Foreign Aid

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya ekosistem kelautan. Dewasa ini ekosistem tersebut terancam rusak karena berbagai faktor sehingga membuat ADB sebagai lembaga keuangan multilateral di kawasan Asia turut serta dalam mendukung konservasi kelautan guna mendorong perekonomian Indonesia. Faktanya ekosistem kelautan memberikan dampak besar seperti menyumbang 3,7% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan berpotensi dapat menyumbang 1,3 kali lipat dari jumlah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan konsep yang berhubungan dengan Ilmu Hubungan Internasional yaitu Konservasi Lingkungan dan Bantuan Luar Negeri, penulis akan menjelaskan dan mengelaborasi bahwa bentuk bantuan luar negeri ADB pada Indonesia dalam COREMAP-CTI Fase III adalah berupa bantuan pendanaan dan bantuan teknis. Program COREMAP-CTI yang sudah dilakukan sebanyak tiga fase ini membuahkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan ekosistem kelautan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, bantuan luar negeri ADB pada Indonesia dinilai cukup signifikan dalam konservasi laut di Indonesia.

Kata Kunci: Asian Development Bank (ADB), Bantuan Luar Negeri, COREMAP-CTI, Konservasi Lingkungan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas perairan sebesar 3.257.483 km² dengan garis pantai sepanjang 108.920,40 km (Widyatun, 2011). Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang paling kaya. Luas terumbu karang di Indonesia merupakan 18% dari total luas terumbu karang di dunia yaitu sekitar 85.200 km² dari 284.300 km². Hal ini selaras dengan kayanya jenis biota laut di Indonesia karena salah satu fungsi terumbu karang sebagai habitat dari berbagai jenis biota laut. Widyatun menyebutkan ada sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan yang hidup di terumbu karang di perairan Indonesia. Kekayaan ini membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah konservasi terumbu karang tertinggi atau sering disebut “*coral triangle*” (Wahyudin, 2019).

Terumbu karang disisi lain adalah ekosistem yang rentan mengalami kerusakan. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1980an terumbu karangnya sudah mengalami kerusakan karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, atau faktor yang berasal dari aktivitas manusia seperti *overfishing*, penambahan penduduk di wilayah pesisir, penebangan hutan, dan masih banyak lagi (Wahyudin, 2019). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan bahwa pada tahun 2018 kondisi terumbu karang di Indonesia adalah 36% dalam kategori jelek, 34% dalam kategori cukup, 23% dalam kategori baik, dan hanya sekitar 7% dalam kategori sangat baik (Hadi, 2018).

Keadaan terumbu karang diatas membuat pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan. Adapun keseriusan ini dimulai pemerintah Indonesia dengan membentuk program berkelanjutan COREMAP-CTI (*Coral Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative*) pada tahun 1998 sebagai upaya konservasi kelautan. COREMAP-CTI diresmikan pada tahun 1998 setelah mendapat dorongan dari Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak dimulainya penelitian, survei, dan perencanaan pada tahun 1980an sampai melibatkan 10 universitas di Indonesia untuk membuat konsep program berkelanjutan yang dapat melestarikan terumbu karang (Rusli, 2009). Program ini sejak awal diterima baik oleh semua kalangan khususnya beberapa lembaga internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan AusAID sehingga mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada COREMAP-CTI dengan pendanaan dari *Asian Development Bank* (ADB) khususnya pada Fase ke-III yang dilaksanakan tahun 2020– 2022. ADB adalah lembaga keuangan internasional di Kawasan Asia Pasifik, dibentuk pada 19 Desember 1966 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya, salah satunya Indonesia. ADB telah memberikan sekitar 820 komitmen pinjaman kepada Indonesia dan banyak diantaranya untuk mendukung konservasi lingkungan, antara lain proyek mengatasi deforestasi dan degradasi hutan sejak tahun 2019 di Kalimantan Barat, proyek transisi iklim melalui *green economy* di Indonesia, proyek sanitasi modern di beberapa daerah terbelakang di Indonesia, dan tentunya program berkelanjutan COREMAP-CTI yang sudah dijalin sejak tahun 1998 (*Asian Development Bank*, 2023).

Konservasi Lingkungan

Konservasi menurut Theodore Roosevelt (1902) adalah upaya untuk memelihara apa yang kita punya, dalam hal ini lingkungan dan sumber daya alam secara bijak (Christanto, 2014). Adapun tujuan pelaksanaan konservasi ini adalah sebagai penyangga kehidupan dengan memelihara, melestarikan serta menjamin keanekaragaman genetik dari sumber daya alam yang ada. Konservasi lingkungan dalam Hubungan Internasional ditandai dengan *Global & Policy Vol.11, No.1, Januari-Juni 2023*

banyaknya konferensi yang membicarakan tentang lingkungan hidup seperti Konferensi Stockholm (1972) atau Paris *Agreement* (2016) yang berbicara tentang perubahan iklim. Konservasi merupakan solusi yang muncul di tengah ancaman keamanan lingkungan yang kian tahun kian berdampak bagi masyarakat internasional sehingga membutuhkan tindakan pencegahan, nonkonfrontasi, dan yang melibatkan aktor selain negara (Trombetta, 2008). Kegiatan konservasi dapat diwujudkan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan COREMAP-CTI ADB Tahun 2020 – 2022 merupakan salah satu upaya Indonesia dalam konservasi kelautan untuk melestarikan sumber daya kelautannya.

Bantuan Luar Negeri

Konsep bantuan luar negeri menurut Carol Lancaster dalam bukunya *“Foreign Aid: Diplomacy, Development, and Domestic Politics”* merupakan perpindahan sumber daya publik seperti hibah (*grants*) atau pinjaman (*loans*) dari pihak pendonor kepada pihak penerima (Lancaster, 2007). Dalam perjalanannya bantuan luar negeri berkembang kearah pembangunan berkelanjutan sehingga menarik organisasi internasional seperti *World Bank*, *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB) untuk berpartisipasi. Selain itu, perkembangan bantuan luar negeri juga terlihat dari empat tujuan utamanya yaitu; dapat menangani masalah global; mendorong perubahan politik dan ekonomi; memajukan demokrasi; dan mengelola konflik (Lancaster, 2007).

Bentuk lain dari bantuan luar negeri dijelaskan oleh Ridell dalam tulisannya yang berjudul *“Does Foreign Aid Really Work?”* yakni bantuan teknis. Bantuan teknis adalah bantuan yang diberikan untuk mengatasi kekurangan keterampilan dan pengetahuan pada program yang akan dilaksanakan pihak penerima. Adapun bentuk bantuan teknis dapat berupa penyediaan ahli, pemberian keterampilan dan saran yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Bantuan teknis juga dapat berupa menyediakan komponen teknis untuk keluaran program yang dapat membantu jalannya pembangunan di negara penerima (Ridell, 2007). Berdasarkan konsep diatas, penulis akan membuktikan bahwa bentuk bantuan luar negeri yang diberikan *Asian Development Bank* (ADB) kepada Indonesia dalam menjalankan program COREMAP-CTI pada tahun 2020 – 2022 adalah bantuan pendanaan dan bantuan teknis. Hal ini sesuai dengan program pinjaman yang diajukan Indonesia kepada ADB sejak COREMAP-CTI Fase I dan sesuai dengan tujuan ADB sebagai bank multilateral.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan memberikan sebuah deskripsi dan elaborasi terkait masalah yang sedang diteliti, kemudian penarikan kesimpulan digunakan untuk melihat hasil dari seleksi data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam melengkapi tulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yakni memperoleh dan mengumpulkan data dari studi literatur, buku di perpustakaan dan menjelajahi internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Bentuk data sekunder ini berupa artikel jurnal, artikel berita atau portal berita *online* yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan Potensi dan Ancaman Ekosistem Laut di Indonesia

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia banyak membawa manfaat seperti menjadi salah satu sektor penyumbang PDB negara tertinggi setiap tahunnya dan mencapai angka 2,4 kuadriliun di tahun 2020 dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Selain itu, memberi manfaat lain seperti menghasilkan 50% oksigen dan dapat sebagai penyerap karbondioksida, bermanfaat sebagai sarana penelitian dan pariwisata, serta berperan besar bagi devisa negara karena Indonesia termasuk dalam 10 besar produsen ikan tertinggi di dunia menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2020.

Satu lagi manfaat kekayaan ekosistem laut Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan kumpulan sedimen kapur yang berasal dari koral yang membentuk koloni. Terumbu karang memiliki banyak manfaat seperti menjadi rumah bagi biota laut dan tempat mereka untuk berkembang biak. Hal tersebut menandakan semakin banyak terumbu karang, semakin banyak pula ikan, udang-udangan yang ada di perairan tersebut dan semakin banyak pula yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk meningkatkan ekonomi mereka (Winarsih, 2018). Dilihat dari letak geografis, perairan Indonesia termasuk dalam perairan yang sangat baik untuk pertumbuhan terumbu karang, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut wilayah *Coral Triangle* dan salah satu anggota dari kerjasama multilateral bernama CTI-CFF.

Kekayaan ekosistem laut Indonesia nyatanya juga rentan terhadap kerusakan, dan kerusakan dapat terjadi jika ekosistem tersebut tidak dijaga dan dilestarikan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan bahwa pada tahun 2018 – 2019, kategori terumbu karang yang buruk di perairan Indonesia sebanyak 33,82%, sedangkan status padang lamun juga masih tergolong kurang sehat, dan tingkat kerapatan hutan bakau di Indonesia bagian timur terus meningkat (LIPI, 2020). Adanya kerusakan yang terjadi tidak lepas dari dua faktor besar yakni perubahan alam dan aktivitas manusia. Faktor perubahan alam yang dapat merusak ekosistem kelautan antara lain; pemanasan global yang dapat menyebabkan *coral bleaching* (pemutihan pada karang yang dapat membunuh karang secara perlahan); terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dll (Rangkuti, 2017).

Selain itu, faktor yang berperan cukup besar dalam kerusakan ekosistem kelautan adalah aktivitas manusia. Banyaknya kegiatan seperti penambangan ikan dan karang yang menggunakan bahan-bahan peledak seperti senyawa *Kalium Sianida* (KCN) setiap tahunnya dapat mengancam populasi biota laut; kegiatan pembuangan limbah perusahaan yang dapat menaikkan suhu air laut sebesar 5 – 10°C sehingga dapat membunuh karang atau sampah yang dibuang sembarangan ke laut yang dapat dijadikan makanan oleh ikan-ikan dan membunuhnya; kemudian kegiatan penggundulan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi sehingga meningkatkan kekeruhan air laut dan menghambat pertumbuhan terumbu karang; sektor pariwisata yang menghasilkan limbah air dingin, limbah minyak, ataupun kegiatan *snorkeling* yang berlebihan dapat berakibat buruk bagi biota laut (Kordi K, 2018).

Berdasarkan penjelasan tentang potensi dan ancaman dari ekosistem kelautan di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa pentingnya konservasi dilakukan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem kelautan di Indonesia agar manfaat yang diberikan tidak berkurang dan dapat membantu Indonesia dalam menjaga suhu bumi maupun menaikkan tingkat perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah mengupayakan konservasi laut dengan membentuk program COREMAP-CTI. Program ini sudah dilaksanakan dengan Fase I dimulai dari tahun 1998 – 2001 yang dikenal dengan Tahap *Global & Policy Vol.11, No.1, Januari-Juni 2023*

Inisiasi; Fase II dimulai dari tahun 2001 – 2007 dikenal dengan Tahap Akselerasi; dan Fase III dimulai dari tahun 2007 – 2013 yang dikenal dengan Tahap Pelembagaan. Namun ditengah program ini berjalan terjadi dua kali restrukturisasi karena berbagai faktor seperti pengesahan UU 23/2014 yang mengatur pemerintah daerah serta keluarnya Kementerian Kemaritiman dan Perikanan (KKP) sebagai *executing agency* sehingga membuat tiga fase COREMAP-CTI juga berubah menjadi; Fase I yaitu Tahap Inisiasi (1998 – 2004); Fase II yaitu Tahap Desentralisasi dan Akselerasi (2005 – 2011); Fase III yaitu Tahap Penguatan Kelembagaan (2014 – sekarang) (IUCN, 2002).

Program COREMAP-CTI Fase III

Program COREMAP-CTI Fase III memiliki beberapa indikator dan komponen yang berbeda dari Fase I dan Fase II. Pada tulisan ini penulis akan fokus pada COREMAP-CTI dengan pendanaan dari *Asian Development Bank* (ADB). Pada Fase III ini, COREMAP-CTI ADB sempat mengalami restrukturisasi tepatnya pada tahun 2019 dimana pemerintah Indonesia mengajukan permintaan restrukturisasi kepada ADB karena keluarnya pergantian *Executing Agency* (EA) (Pranita, 2022). Program COREMAP-CTI ADB Fase III sendiri dijalankan dari 4 Maret 2020 hingga 31 Desember 2022. Rangkaian pertama untuk memulai COREMAP-CTI ADB Fase III adalah *kick-off meeting* pada 30 – 31 Maret di Hotel Ritz Carlton, Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh Perwakilan Provinsi Bali, Ketua KKP, Sekretaris Utama Bappenas, Perwakilan LIPI, dan perwakilan mitra pelaksana serta semua pihak yang terlibat. Pertemuan ini membicarakan tujuan program yang ingin meningkatkan 10% efektivitas pengelolaan KKP khususnya di wilayah Lesser Sunda (Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu). Adapun peningkatan KKP yang diharapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebesar 3,1 juta Ha dari luas KKP 2020 yang hanya 23,8 juta Ha menjadi 32,5 juta Ha (ICCTF, 2021).

COREMAP-CTI Fase III menggunakan pendanaan dari ADB untuk mendanai enam proyek implementasi *grand package* 1 – 6 di tiga *Marine Protected Area* (MPA) yakni Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu; satu proyek kajian rantai pasok (*supply chain*) komoditas unggul yakni ikan tuna, ikan kakap merah, dan rumput laut; tiga kegiatan peningkatan SDM yaitu beasiswa program Master di Queensland University meliputi *short term international program*, dan *long term international program*. Program COREMAP-CTI ADB Fase III dilaksanakan oleh *Steering Committee* (SC) yang terdiri dari perwakilan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi BRIN, Bappeda Bali, Bappeda NTB, dan Direktur Eksekutif ICCTF (Fardianto, 2022). Dalam susunan SC, ADB tidak termasuk dalam keanggotaan karena peran ADB hanya sebagai lembaga pendonor dan sesuai dengan tujuan ADB yang ingin membantu pembangunan di negara anggotanya tanpa campur tangan dengan keadaan politiknya.

Mengacu pada teori bantuan luar negeri yang penulis gunakan bahwa posisi *Asian Development Bank* (ADB) sebagai lembaga pendonor memiliki fungsi untuk meningkatkan pembangunan negara penerima dalam mengelola sumber daya alam potensialnya. Melihat hasil *kick-off meeting* COREMAP-CTI ADB dan susunan manajemen pelaksanaannya, fungsi ADB sebagai pendonor sudah sesuai dengan tujuannya tanpa ikut campur dalam urusan politik Indonesia.

Pelaksanaan COREMAP-CTI ADB Fase III di Tiga Wilayah MPA

Nusa Penida terletak di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Daerah ini memiliki potensi sumber daya yang besar sehingga menjadi salah satu area dari *Coral Reef Triangle* bersama

dengan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Ketiga perairan ini memiliki kekayaan sekitar 1.419 Ha terumbu karang, 230 Ha hutan mangrove, dan 108 Ha padang lamun (ICCTF, 2020). Kekayaan ini disertai dengan banyaknya spesies biota laut yang termasuk dalam kategori ETP seperti ikan Mola Mola, ikan Pari Manta, Hiu, Penyu Laut, Lumba Lumba, dan Dugong. Kayanya perairan Nusa Penida ini membuat aktivitas pariwisata di wilayah ini meningkat setiap tahun. Menurut data dari Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Klungkung, jumlah turis yang mendatangi Nusa Penida dapat mencapai angka 200.000 orang/tahun. Selain itu, faktor seperti tingginya jumlah perikanan tangkap setiap tahun dan total sampah yang ditemukan di sekitaran Nusa Penida mendorong ICCTF menjadikan Nusa Penida sebagai salah satu Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

ICCTF memasukkan Nusa Penida sebagai salah satu wilayah konservasi COREMAP- CTI dalam *Grand Package 1 dan 4* dengan judul *Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation in Nusa Penida* dan *Support for Ecosystem based Resources Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods in Nusa Penida*. Dengan judul program tersebut, *grand packages* ini lebih fokus untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pesisir serta mewujudkan wisata bahari yang berkelanjutan dengan mendukung pencaharian utama dan alternatif melalui sumber daya kelautan. Kegiatan konservasi di Nusa Penida dimulai dengan rapat konsultasi dan *focus group discussion* (FGD) oleh *steering committee* (SC) dan para *stakeholder* yang terlibat dan menghasilkan *Standard Operation Procedure* (SOP) seperti SOP teknis untuk izin masuk ke Nusa Penida yang sudah dipublikasikan pada Oktober 2021 yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan selanjutnya seperti melakukan kajian akademik untuk mendukung biota laut, mengidentifikasi lokasi rehabilitasi, melakukan berbagai pelatihan pengawasan dan pelatihan *eco-tourism*, dan melakukan pembangunan infrastruktur untuk melengkapi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh mitra pelaksana, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan masyarakat pesisir lainnya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di wilayah Nusa Penida.

Gili Matra merupakan singkatan dari Gili Meno, Anyer, dan Trawangan yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2001, wilayah perairan ini ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Laut Nasional dengan nama Taman Wisata Alam Perairan Gili Matra dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 99/Ktpts-II/2001 pada 15 Maret 2001 kemudian berganti nama menjadi Taman Wisata Perairan (TWP). Perairan yang memiliki luas 2.954 Ha ini memiliki ekosistem terumbu karang yang tinggi serta fauna air seperti ikan Pari Manta, Paus, Hiu, dan tiga jenis Penyu Laut langka yakni Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*), dan Penyu Sisik (*Eritmochelys Imbricate*) (ICCTF, 2020). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Gili Matra membuat perairan ini salah satu tujuan wisata yang banyak didatangi wisatawan dari berbagai manca negara. Tingginya aktivitas manusia karena faktor pariwisata membuat kekhawatiran akan rusak dan berkurangnya kualitas sumber daya yang ada. Oleh karena itu, ICCTF juga menetapkan TWP Gili Matra menjadi salah satu KKL yang perlu dilestarikan.

Gili Matra masuk menjadi salah satu KKL dalam program COREMAP-CTI ADB dengan *grand package 2 dan 5* dengan judul program *Support for MPA Management and ETP NPOA in Gili Matra* dan *Support for Ecosystem-based Resources Management Plans* yang berarti fokus untuk melestarikan biota laut dan mengelola sumber daya yang ada. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan kajian akademik pada penyu sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya, melakukan beberapa pelatihan pengolahan dan produksi sumber daya alam dan *digital marketing* pada masyarakat setempat untuk memajukan wisata Gili Matra. Kemudian pelatihan menyelam juga diajarkan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diharapkan dapat menjadi sumber mata

pencaharian. Lalu kegiatan rehabilitasi karang bintang dan *fish dome* yang sudah mengalami degradasi di perairan Gili Matra, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana di KKL.

Gili Balu terletak di Poto Tano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Gili Balu adalah kumpulan delapan pulau kecil (Pulau Kenawa, Pulau Mandiki, Pulau Paserang, Pulau Kambing, Pulau Belang, Pulau Ular, Pulau Namo, dan Pulau Kalong) yang saling berdekatan dan membentuk satu kawasan perairan dengan segala potensi maritimnya yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Gili Balu yang sudah ditetapkan sebagai TWP memiliki kekayaan ekosistem laut seperti menjadi habitat bagi Penyu Laut, ikan Pari Manta, Hiu, Lumba Lumba, Paus, dan Dugong. Oleh karena itu, Gili Balu termasuk dalam salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi dengan angka turisnya dapat mencapai 2.000 orang/tahun (ICCTF, 2020). Tingginya jumlah turis ini selaras dengan tingginya aktivitas manusia di kawasan Gili Balu dan hal ini menimbulkan kekhawatiran sehingga mendorong ICCTF menjadikan Gili Balu sebagai salah satu KKL untuk COREMAP-CTI Fase III.

Gili Balu termasuk dalam *grand package* 3 dan 6 dengan judul program *Consulting Services for Support MPA and ETP NPOA Implementation in Gili Balu* dan *Support for MPA and ETP NPOA Implementation in Gili Balu* sehingga lebih fokus untuk melestarikan sumber daya alam dan mengimplementasikan NPOA di kawasan konservasi. Adapun kegiatan konservasi di kawasan ini dimulai dengan melakukan konsultasi publik terkait program yang akan dilakukan sehingga menghasilkan tiga SOP yakni SOP Pengawasan, SOP Penguatan Kelembagaan, dan SOP Perizinan dan Pemanfaatan yang disahkan pada Januari 2022 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTB (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Selanjutnya melakukan beberapa pelatihan seperti pelatihan penangkapan gurita dan ikan tuna ramah lingkungan, pelatihan mengelola ikan mentah yang ditujukan kepada POKMASWAS dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan rehabilitasi mangrove dan pembangunan infrastruktur juga dilakukan di Gili Balu untuk mendukung sarana dan prasarana konservasi.

Keterlibatan Asian Development Bank (ADB) dalam Isu Konservasi Lingkungan

Asian Development Bank (ADB) merupakan bank pembangunan yang berada di Kawasan Asia dan Asia Pasifik yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1966. Bank ini dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik dari keterpurukan ekonomi setelah Perang Dunia II. Dalam perjalanannya, ADB mulai memerhatikan isu konservasi lingkungan sejak tahun 1972 setelah diadakannya *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia yang menghasilkan konsep bahwa pembangunan berkelanjutan (Floyd, 2013). Maka dari itu, ADB yang salah satu tujuannya adalah mendukung pembangunan, mulai memberikan arahan dan dukungan pada negara-negara anggotanya agar mulai melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam hubungannya dengan Indonesia, salah satu program konservasi lingkungan yang dibantu oleh ADB adalah COREMAP-CTI. ADB sudah menjadi pendonor pada program ini sejak Fase I tahun 1998 hingga Fase III yang saat ini masih berlangsung. Keseriusan ADB dalam mendukung konservasi lingkungan terlihat dalam masuknya isu lingkungan pada Tujuh Prioritas Operasional pada Strategi ADB 2030 (Asian Development Bank, 2018). Hal ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri ADB dalam program COREMAP-CTI adalah salah satu upaya ADB dalam mendukung konservasi lingkungan di Indonesia untuk mewujudkan salah satu fungsinya sebagai lembaga keuangan multilateral di Kawasan Asia Pasifik.

Bentuk Bantuan Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dalam COREMAP-CTI ADB Fase III

Bantuan pendanaan yang diberikan ADB pada program COREMAP-CTI Fase III adalah hibah/pinjaman yang disalurkan melalui *Global Environment Facility* (GEF) dan diberikan kepada Bappenas dan ICCTF sebagai *Executing Agency* (EA). Bantuan pendanaan ini disahkan dalam *website* resmi ADB dengan nama proyek Grant No.0379-INO(EF): *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) *Project*. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa COREMAP-CTI Fase III mengalami restrukturisasi, hal ini juga memengaruhi alokasi pendanaan yang diberikan ADB. Adapun rincian realokasi dana sebelum dan sesudah restrukturisasi adalah:

Tabel 1 Alokasi Pendanaan sebelum dan sesudah Restrukturisasi

Kategori	Jlh Alokasi sebelum Restrukturisasi (\$)	Jlh Alokasi sesudah Restrukturisasi (\$)
Material	86,759.71	-
Survey dan Beasiswa	1,262,573.96	-
Pelatihan	714,6680.03	800,000.00
Layanan Konsultasi	630,504.77	4,421,1335.04
Dukungan infrastruktur	84,346.49	-
Jumlah Biaya	2,778,864.96	5,221,135.04

Sumber: (Asian Development Bank, 2020)

Menurut *Project Administration Manual* (PAM) yang menjelaskan restrukturisasi COREMAP-CTI Fase III, hibah ADB ke Indonesia ditutup dua tahun lebih awal dari waktu yang seharusnya karena adanya restrukturisasi. Penutupan ini dilakukan pada 31 Desember 2017 dengan dana yang berhasil dicairkan sebesar \$11,727,165.97. Lalu pada akhir Januari 2021, Indonesia mengajukan proposal restrukturisasi kepada ADB dan ADB menyetujuinya dengan mengeluarkan dana hibah sebesar \$8,00 juta untuk meneruskan program COREMAP-CTI Fase III.

Bantuan teknis merupakan bantuan lain yang diberikan ADB untuk mendukung program COREMAP-CTI Fase III yang dilakukan ADB dalam tahap perencanaan dan tahap hasil. Pada tahap perencanaan, ADB memberikan bantuan dalam merancang desain program, memberikan ide, strategi, nasihat serta pedoman konsep agar dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia. Lalu pada tahap hasil, ADB membantu dalam *monitoring* program dengan mewajibkan Indonesia menyediakan dokumen-dokumen laporan seperti *Procurement Plan*, *Audit Report on Financial Statements*, *Project Performance Report* *Global & Policy Vol.11, No.1, Januari-Juni 2023*

(PPR), dan *Environment Safe Guard Report* sebagai pertanggungjawaban Indonesia kepada ADB selaku lembaga pendonor dalam program COREMAP-CTI. Semua dokumen ini telah dipenuhi dan di-*publish* oleh Indonesia ke *website* ICCTF, ADB, dan LIPI.

ADB juga menyediakan *Accountability Mechanism* (AM) yakni suatu forum independen bagi orang-orang yang terkena dampak proyek pendanaan ADB untuk menyuarakan masukan mereka dan meminta dilakukannya tinjauan ulang terhadap program yang sudah berjalan. Kemudian ADB juga meminta disediakannya *Project Information Disclosure* (PID) yang berhubungan dengan informasi kegiatan proyek seperti *booklet*, sosial media, dan sejenisnya (ICCTF, 2021).

Output COREMAP-CTI ADB

Keadaan ketiga wilayah MPA sebelum COREMAP-CTI dilakukan adalah tidak adanya keselarasan dalam kegiatan konservasi di Gili Matra dan Gili Balu. Walaupun TWP ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan konservasi lautnya tidak selaras dengan pengembangan pariwisata di daratan. Hal ini membuat Gili Matra dan Gili Balu membutuhkan SOP untuk mengarahkan program konservasinya. Sedangkan untuk Nusa Penida, adanya program alih fungsi lahan pada kurun 2013 – 2019 membuat Nusa Penida padat pemukim tetapi tidak adanya kegiatan rehabilitasi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem kelautan di wilayah ini.

Pelaksanaan COREMAP-CTI Fase III selama kurang lebih dua tahun menghasilkan beberapa *output* yang memberikan dampak signifikan bagi tiga wilayah MPA. Adapun hasil yang pertama adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan ekosistem terumbu karang di dalam dan di luar tiga wilayah MPA berdasarkan standar EVIKA.

Tabel 2 Hasil Peningkatan Skor EVIKA di Tiga Wilayah MPA 2021 – 2022

MPA	Luas Total (Ha)	Skor EVIKA		Dampak Manajemen
		2021	2022	
Nusa Penida	20.057	62.97%	71.2%	8,23%
Gili Matra	2.954	62.97%	82.06%	17.87%
Gili Balu	6.005	-	40.03%	-

Sumber: (ICCTF, 2022)

Hasil selanjutnya adalah penguatan kelembagaan program ini menghasilkan 34 orang bersertifikasi dalam *Supply Chain Fisheries Tuna Longline* yang pelatihannya dilaksanakan pada 6 – 9 September 2021 di Bali, serta menghasilkan empat mahasiswa program magister dari University of Queensland yang telah lulus pada Juli 2022 silam. Kemudian program ini juga menghasilkan tujuh SOP untuk mengembangkan ketiga wilayah MPA, serta kurang lebih 209 orang telah dilatih untuk pengembangan ekowisata di Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Balu dan 196 anggota POKMASWAS telah terdaftar dan terlatih untuk melakukan pengawasan sumber daya alam di wilayah KKL. Selanjutnya dihasilkannya Pembayaran Jasa

Ekosistem atau *Payment of Ecosystem Service* (PES) di ketiga wilayah MPA untuk meningkatkan efisiensi pembayaran jasa di wilayah KKL.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan maritim karena terletak di wilayah *coral triangle*, hal ini membuat Indonesia harus menjaga kelestarian maritimnya dengan melakukan kegiatan konservasi salah satunya memprakarsai COREMAP-CTI untuk melestarikan lautnya secara berkelanjutan. ADB sebagai salah satu bank multilateral di kawasan Asia, memiliki salah satu fungsi yakni mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggotanya, maka ADB memberikan bantuan kepada Indonesia dalam mendukung upaya konservasi laut melalui program COREMAP-CTI sejak Fase I hingga Fase III. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh ADB ke Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yakni bantuan pendanaan berupa hibah dengan jumlah \$5,2 juta diturunkan pada pemerintah pusat sebagai *executing agency* untuk membiayai enam *grand packages* di tiga wilayah MPA. Kemudian bantuan teknis, pemberian ide, strategi, nasihat, dan pengawasan melalui syarat dan ketentuan yang diberikan kepada Indonesia dengan menyediakan laporan kegiatan COREMAP-CTI Fase III.

Referensi

- Anugrah. (2020). Implementation of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) in Indonesia and Phillipines. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-7.
- Asian Development Bank. (2018). *Strategi 2030: Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2020). *Project Administration Manual: Republic Indonesia on COREMAP-CTI*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2023, March 30). *Project & Tenders*. Retrieved from Asian Development Bank: <https://www.adb.org/projects/country/indonesia>
- Christanto, J. (2014). *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- Christie, P., Pietri, D. M., Stevenson, T. C., Pollnac, R., Knight, M., & White, A. T. (2016). Improving Human and Environmental Conditions Through the Coral Triangle Initiative: Progress and Challenges. *Elsevier*, 1 - 23.
- Fardianto, F. (2022, Februari 03). *Rapat Steering Committee COREMAP-CTI ADB*. Retrieved from BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: <https://bappeda.ntbprov.go.id/rapat-steering-committee-coremap-cti-adb/>
- Firda, Z. (2019). *Kerjasama Asian Development Bank (ADB) dengan Indonesia dalam Kerangka Kerja Country Partnership Strategy (CPS) Periode 2012 - 2014*. Retrieved from repository.upnvj.ac.id.
- Floyd, R. &. (2013). *Environmental Security: Approaches and Issues*. London: Routledge.
- Hadi, T. A. (2018). *Status Terumbu Karang Tahun 2018*. Retrieved from LIPI: <http://oceanografi.lipi.go.id/haspen/buku%20status%20karang%202018%20digital.pdf>
- Hockings, M. e. (2006). *Evaluating Effectiveness: A Framework for assesing management effectiveness of protected areas*. Switzerland: IUCN.

- ICCTF. (2020). *Marine Protected Area: Gili Balu*. Jakarta: ICCTF. ICCTF. (2020). *Marine Protected Area: Gili Matra*. Jakarta: ICCTF. ICCTF. (2020). *Marine Protected Area: Nusa Penida*. Jakarta: ICCTF.
- ICCTF. (2020). *Pelaksana Paket Kerja Grant Package COREMAP-CTI ADB*. Retrieved from <https://www.icctf.or.id/coremap-cti/coremap-cti-asian-development-bank/>
- ICCTF. (2021). *Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat*.
- ICCTF. (2022). *Project Performance Report Quarter 4, 2022: Indonesia COREMAP-CTI ADB*. Jakarta: ICCTF.
- IUCN. (2002, June). *The Coral Reef Rehabilitation and Management Program: Phase I Evaluation Report*.
- Jane Garrido, d. (2005). *Unpacking The ADB: A Guide To Understanding The Asian Development Bank*. Delhi: Bank Information Center's South Asia Office.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Konsultasi Publik I pembahasan SOP Prioritas Pengelolaan TWP Gili Balu, Sumbawa Barat*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar/artikel/37596-konsultasi-publik-i-pembahasan-sop-prioritas-pengelolaan-twp-gili-balu-sumbawa-barat>
- Kordi K, M. G. (2018). *Mengenal dan Mengelola Terumbu Karang*. Jakarta: Indeks.
- Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- LIPI. (2020, Juli 01). *Kondisi Terkini Ekosistem Pesisir Indonesia*. Retrieved from LIPI: <http://lipi.go.id/berita/Kondisi-Terkini-Ekosistem-Pesisir-Indonesia/22072>
- Muawanah, U. d. (2018). Persepsi Dampak COREMAP II Terhadap Ekosistem dan Biodiversitas Masyarakat Pesisir Ekosistem dan Biodiversitas Laut di Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Sosek KP Vol. 12 No. 1*, 29 - 42.
- Pranita, E. (2022, April 04). *COREMAP-CTI Bantu Dorong Pengembangan Model Pengelolaan Pesisir Raja Ampat*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/04/190300023/coremap-cti-bantu-dorong-pengembangan-model-pengelolaan-pesisir-raja-ampat?page=all#>
- Rangkuti, A. M. (2017). *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridell, R. C. (2007). *Does Foreign Aid Really Work?* New York: Oxford University Press Inc.
- Rusli, I. (2009, December 6). *COREMAP: Program Utang untuk Kesejahteraan*. Retrieved from LIPI: <http://lipi.go.id/berita/coremap:-program-utang-untuk-kesejahteraan/3242>
- Solichah, P. N. (2021). *Bantuan Luar Negeri World Bank pada Indonesia dalam Program COREMAP-CTI Fase III Tahun 2014 - 2020*. Retrieved from repository.upnvj.ac.id.
- Toussaint, E., & Millet, D. (2010). *Debt, The IMF, and The World Bank*. New York: Monthly Review Press.
- Trombetta, M. J. (2008). Environmental Security and Climate Change: Analysing the discourse. *Cambridge Review of International Affairs Vol 21, No 4*, 584-603.
- Wahyudin, Y. e. (2019). Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut Indonesia. *Jurnal Cendikia Ihya Vol.2, No. 2*, 37-52.
- Widyatun. (2011). Peran Masyarakat dalam Pelestarian Terumbu Karang dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. VI, No. 2*, 1-19.
- Winarsih, S. (2018). *Ikhtisar Kemaritiman : Potensi Maritim Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.